BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)

Laporan Bulanan:

MARET 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

PASAR PANGAN SEGAR AMAN

B2SA
Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

PPH
Pola Pangan Harapan

Badan Pangan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga ‘’Laporan Bulan Maret 2025 Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan’’ dapat diselesaikan.

Laporan ini berisikan program dan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sebagai bentuk implementasi kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran untuk perbaikan pada periode berikutnya sangat diharapkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Jakarta, April 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan

Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Tujuan 2

I.3 Metodologi Penyusunan Laporan 2

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT **3**

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN **5**

III.1 Realisasi Fisik dan Keuangan 5

III.2 Monitoring Kegiatan Prioritas 10

BAB IV PENUTUP **50**

IV.1 Kesimpulan 50

IV.2 Permasalahan 50

IV.3 Rekomendasi 50

LAMPIRAN **52**

Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024 52

Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Oktober Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan 54

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan empat program yaitu: 1) pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan; 3) pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 2 Desember 2024 Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000,- (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Hasil dari pemantauan, evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Maret Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Maret tahun 2025. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Maret Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bulan Maret tahun 2025 baik fisik maupun keuangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

I.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Maret Tahun 2025.
2. Mengetahui realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Maret Tahun 2025.

I.3 Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Maret tahun 2025 dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai Lembar III DIPA Revisi ke-4 tanggal 25 Maret 2025. Pada dokumen tersebut target realisasi Bulan Maret 2025 adalah sebesar 2,49%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut:

Table 1. Target Fisik dan Keuangan Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Maret 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-4

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Maret 2025	
Program, Kegiatan & KRO	**RO/Output**	**Komponen**	**Anggaran (Rp)**	**Fisik**	**Anggaran (Rp) 2.49%**	**Fisik**
6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			40.284.839.000 12.333.462.000*		1.003.092.491 307.103.204*	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000 679.000.000*	9 rekomendasi Kebijakan	30.969.624 16.907.100*	0 rekomendasi kebijakan
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000 1.635.382.000*	10 kegiatan	195,714,000 40,721,012*	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000 1.264.060.000*	9 Kegiatan	115.249.152 31.475.094*	1 kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000 391.010.000*	3 Kegiatan	121.030.185 9.736.149*	0 Kegiatan
AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000 46.825.000*	3 NSPK	14,940,000 1,165,943*	1 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000 276.550.000*	5 NSPK	24.900.000 6.886.095*	0 NSPK

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Maret 2025	
Program, Kegiatan & KRO	**RO/Output**	**Komponen**	**Anggaran (Rp)**	**Fisik**	**Anggaran (Rp) 2.49%**	**Fisik**
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000 211.400.000*	3 NSPK	7.470.000 5.263.860*	0 NSPK
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	2.000.000.000 1.176.595.000*	10 UMKM	49,800,000 29,297,216*	0 UMKM
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2.500.000.000 722.860.000*	500 Produk	62.250.000 17.999.214*	13 Produk
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000 1.075.400.000*	1 Kegiatan	87,150,000 26,777,460*	1 Kegiatan
QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Operasional pasar pangan segar aman Pusat	904.729.000 60.100.000*	1 Lembaga	22.527.752 1.496.490*	0 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina	1.499.760.000 707.390.000*	22 Lembaga	37.344.024 17.614.011*	0 OKKP
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000 116.250.000*	1 Kelompok Masyarakat	17,043,054 2,894,625*	0 Kelompok Masyarakat
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	2.998.000.000 1.389.630.000*	1 Laporan	74.650.200 34.601.787*	0 Laporan
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000 356.010.000*	1 Data	37,350,000 8,864,649*	0 Data
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000 2.225.000.000*	4 Unit	104.704.500 55.402.500*	0 Unit

Catatan: * : Anggaran setelah dikurangi blokir

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000,- sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025, Nomor DIPA 125.01.1.690590/2025 tanggal 5 Desember 2024. Namun pada Bulan Januari 2025, terjadi revisi DIPA berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 pada tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana perlu dilakukan efisiensi belanja Badan Pangan Nasional sebesar 60,16%. Oleh karena hal tersebut, anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dapat dibelanjakan pada bulan Maret 2025 adalah sebesar Rp. 12.333.462.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Realisasi keuangan pada bulan Maret Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Maret Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (2,49%)		Realisasi Bulan Maret 2025		Realisasi SP2D hingga Maret 2025	
Program, Kegiatan & KRO	**RO/Output**	**Komponen**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**
6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			1.003.092.491 307.103.204*		460.628.454		669.560.032	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	30.969.624 16.907.100*	0 rekomendasi kebijakan	0	0 rekomendasi kebijakan Realisasi sdh diklaim sebelumnya, keg bln ini mrpk bagian dari kegiatan sblmnya • Kertas Posisi Indonesia: Pembahasan draft vanilla standard • Rekomendasi kebijakan keamanan dan mutu pangan • Proses penyusunan Posisi Indonesia utk draft standar kayumanis pd forum Chair dan Cochair	0	2
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	195,714,000 40,721,012*	1 Kegiatan	44,202,633	1 Kegiatan	88,774,207	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	115.249.152 31.475.094*	1 kegiatan	116.919.425	1 kegiatan: Sosialisasi Perbadan ttg	123.034.605	1 kegiatan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (2,49%)		Realisasi Bulan Maret 2025		Realisasi SP2D hingga Maret 2025	
Program, Kegiatan & KRO	**RO/Output**	**Komponen**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**
	Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan			(9,2%)**	Keamanan Pangan		
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	121.030.185 9.736.149*	3 Kegiatan	40.467.574	0 Kegiatan	83.987.442	1 Kegiatan
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	14,940,000 1,165,943*	1 NSPK	0	1 NSPK	46,619,345	3 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	24.900.000 6.886.095*	0 NSPK	0	0 NSPK Telah berproses beebrapa kegiatan: • Penyusunan standar beras fortifikasi • Pertemuan Pra PAK RPP Label dan Iklan Pangan telah selesai • Pengiriman Surat Permohonan penetapan RPP ttg Perubahan atas PP 86/2019 kepada Presiden • Rakor pembahasan regulasi dan optimalisasi program MBG	0	0

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (2,49%)		Realisasi Bulan Maret 2025		Realisasi SP2D hingga Maret 2025	
Program, Kegiatan & KRO	**RO/Output**	**Komponen**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	7.470.000 5.263.860*	3 NSPK	0	0 NSPK	0	0 NSPK
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	49,800,000 29,297,216*	0	0	0	0	0
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	62.250.000 17.999.214*	500 Produk	25.905.943	13 Produk	37.634.443	185 Produk Izin Edar (1 Rapat)
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	87,150,000 26,777,460*	1 Kegiatan	66,200,500	1 Kegiatan	100,295,505	1 Kegiatan
QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Operasional pasar pangan segar aman Pusat	22.527.752 1.496.490*	1 Lembaga	0	0 Lembaga	12.490.106	0 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina	37.344.024 17.614.011*	0 OKKP	33.826.510 (4,78)** (192%)***	0 lembaga Penilaian telah dilakukan terhadap 2 OKKPD yaitu Kalbar dan Kep Babel	33.826.510	0 OKKP
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	17,043,054 2,894,625*	0	0	0	0	0
QIA-Pengawasan dan	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	74.650.200 34.601.787*	1 Laporan	133.105.869	0 Laporan	142.897.869	0 Laporan (1 Kegiatan)

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (2,49%)		Realisasi Bulan Maret 2025		Realisasi SP2D hingga Maret 2025	
Program, Kegiatan & KRO	**RO/Output**	**Komponen**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**	**Keuangan (Rp)**	**Fisik**
Pengendalian Produk	Pangan							
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	37,350,000 8,864,649*	0	0	0	0	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan		104.704.500 55.402.500*	4 Unit 2 Unit*	0	0 Unit	0	0 Unit

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional posisi bulan Maret Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Maret Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebesar Rp. 460.628.454,- atau (3,73%) dari target 2,49% berdasarkan anggaran setelah dikurangi blokir. Realisasi anggaran per Direktorat sampai dengan bulan Maret 2025 sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Keuangan Direktorat Lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Maret Tahun 2025

No	Uraian	PAGU (Rp)		Realisasi SP2D			Sisa Anggaran
		DIPA	Revisi	Rp	% DIPA	% Revisi	
HA. 6877	**Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan**	**40.284.839.000**	**12.333.462.000**	**669.560.032**	**1,66**	**5,43**	**12.132.858.422**
	Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan	16.144.460.000	4.406.462.000	235.689.057	1,45	5.35	4.170.772.943
	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	8.372.000.000	2.927.000.000	156.861.115	1,87	5,36	2.770.138.885
	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	15.768.379.000	5.000.000.000	277.009.860	1,76	5,54	4.722.990.140

Sumber: Data SAKTI Kementerian Keuangan

Dari Tabel 3 di atas, realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Maret 2025 mencapai 1,66% atau sebesar 5,43% berdasarkan PAGU Revisi.

III.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama bulan Maret Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.2.1 Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

A. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal di Citeureup, Bogor

Monitoring kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2025 pada penerima manfaat kegiatan di Usaha Penggilingan Aci SUKARDI berlokasi di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Usaha ini berdiri sejak tahun 1993. Produk yang dihasilkan adalah Tepung Tapioka. Usaha ini merupakan plasma dari UD Boss Tani yang bergerak di bidang usaha pengolahan tepung singkong di Kabupaten Bogor.

Kondisi awal usaha memiliki modal awal sebesar Rp 5.000.000,-. Bahan baku yang diperlukan sebanyak 5-6 ton/hari yang diperoleh dari sekitar kecamatan. Peralatan yang dimiliki semi modern, yang terdiri atas: mesin penggerak, mesin gobek/penyaring, mesin penggiling, dan alat jemur. Jumlah tenaga kerja dimiliki sebanyak 4 orang. Rumah produksi seluas 1.500 m, yang terbagi atas area penerimaan, sortasi, pembersihan dan penyimpanan bahan baku, pengemasan dan penyimpanan produk. Rencana penambahan luas bangunan produksi untuk penambahan alat baru seluas 1.000 m. Sebagai penunjang proses produksi terdapat listrik dengan kapasitas 900 watt. Sumber air bersih berasal dari sungai sekitar rumah produksi.

Kapasitas Produksi saat ini: Rendemen tepung tapioca yang dioleh sebanyak 25% (dari singkong 100 kg singkong basah menjadi 24-25 kg tepung tapioca); Kapasitas produksi 1.25-1.5 ton/hari (30-36 ton/bulan); Harga tepung tapioca yang ditampung oleh Inti UD Boss Tani sebesar Rp 10.500/kg; Pemasaran: Produk yang dihasilkan dikirim ke UD Boss Tani Bogor sebagai Inti. Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, bantuan fasilitasi yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional

berupa peralatan pengolah singkong menjadi tepung tapioca, yang terdiri atas: Mesin Pencuci (1 unit), Mesin Pemarut (1 unit), Mesin Pengayak (1 unit) dan Mesin Pemarut Halus Tepung (1 unit).

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan koordinasi dengan penerima manfaat Usaha Penggilingan Padi (UPP) Aci Sukardi, Dinas Pangan (DP) Kabupaten Bogor dan offtaker produk olahan CV Boss Tani Bogor. Hasil koordinasi antara lain: Bapanas akan melaksanakan pembinaan atas usaha pengolahan singkong dalam rangka pengembangan usaha pengolahan pangan lokal dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumi pangan; UPP Aci Sukardi akan memanfaatkan bantuan alat untuk meningkatkan produksi; CV Boss Tani berlaku sebagai inti dari UPP dan menjadi offtaker produk olahan yang dihasilkan; DP Kabupaten Bogor akan memberikan pembinaan dalam rangka pengembangan UMKM pelaku pengolahan pangan; dan Pemerintah Desa akan mendampingi sebagai pendamping UPP dalam pengembangan kapasitas produksi.

2. Monitoring Pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Program Makan Bergizi Gratis

Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bekasi dan Kota Depok dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Direktorat 3.1 bersama Direktorat 3.3 dengan tujuan memperoleh masukan dari pelaksana program MBG sebagai bahan penyusunan Pedoman Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk Mendorong Program MBG yang sedang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional.

Pemantauan dilakukan di SPPG Kota Bekasi - Yayasan Tahfidz Al Quran Baitul Mukmin yang bermitra dengan PT. Afifah Berkah Cemerlang (Afifah Catering)

dalam penyediaan makanan bergizi sejak 6 Januari 2025. SPPG ini melayani 3.567 penerima manfaat, yang terdiri dari 3.211 siswa di tingkat TK, SD, dan SMP, serta 177 tenaga pendidik, 144 balita, 10 ibu hamil, dan 25 ibu menyusui. Operasional SPPG ini dikelola oleh satu kepala SPPG, satu akuntan, dan satu ahli gizi, sementara PT. Afifah memiliki 47 karyawan yang terbagi dalam lima bagian utama, yaitu bahan makanan, perlengkapan dapur, pemasakan dan pemorsian, distribusi, serta manajemen limbah. PT. Afifah telah memperoleh Sertifikat Laik Sanitasi Higienis (SLSH) dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan memiliki SOP dalam penanganan makanan.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa menu sayur menjadi makanan yang paling sering tidak dikonsumsi oleh siswa, sehingga menyebabkan sisa makanan. Sisa makanan ini kemudian dimanfaatkan oleh peternak lele di sekitar SPPG, sementara sisanya dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS). Selama bulan Ramadhan, pemberian makanan kepada siswa tetap dilaksanakan dengan menu "kering", seperti telur rebus, susu UHT 125ml, tahu isi goreng, dan kurma. Namun, untuk ibu hamil dan kelompok penerima manfaat lainnya tidak diberikan makanan.

Pihak SPPG menyampaikan bahwa program MBG mendapat respons positif dari pihak sekolah, namun hingga saat ini belum ada kegiatan edukasi gizi bagi siswa dan penerima manfaat lainnya. Kepala SPPG berencana untuk melaksanakan edukasi gizi yang akan diberikan oleh ahli gizi dari SPPG tersebut. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan kunjungan ke SPPG khusus yang dibangun oleh BGN untuk program MBG serta sosialisasi dan edukasi kepada penerima manfaat, guru, dan orang tua terkait konsumsi makanan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta penanganan food waste.

3. Sosialisasi Pangan B2SA di Masjid Istiqlal

Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan MUI di Masjid Istiqlal pada hari Jumat, 14 Maret 2025, dalam rangka Gerakan Wakaf Produktif, Literasi Halal, dan Bazar Ramadhan. Kegiatan ini dibuka oleh Imam Besar Masjid Istiqlal RI dan dihadiri oleh peserta dari Lembaga Wakaf MUI, jemaah masjid. Bapanas turut berpartisipasi dalam sesi "Halal Talk" dengan mensosialisasikan pangan B2SA. Materi yang disampaikan berjudul "Ragam Makanan Halal dan Thoyyib", yang menekankan pentingnya konsumsi pangan yang tidak hanya halal, tetapi juga sehat dan aman bagi masyarakat.

Bapanas juga membagikan 300 botol jus dan 2000 buah pisang kepada jemaah Masjid Istiqlal sebagai contoh nyata penerapan konsumsi pangan B2SA. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat, halal, dan bergizi.

4. Audiensi bersama DPRD Kota Tegal

Audiensi dengan DPRD Kota Tegal dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2025 di Kantor Badan Ketahanan Pangan Jakarta. Bertujuan untuk mengetahui program dan kegiatan Badan Pangan Nasional yang bisa dilaksanakan di Kota Tegal. Pada kesempatan tersebut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan menjelaskan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan menjadi pilar penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam berbagai regulasi, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menekankan perlunya konsumsi pangan yang B2SA

sebagai salah satu strategi utamanya. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah adalah melalui Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan luas terhadap pangan sehat, sekaligus meningkatkan perputaran roda ekonomi regional.

Tantangan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat masih cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif dengan pendekatan yang menarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi pola konsumsi B2SA melalui program B2SA *Goes to School* serta Desa B2SA dan Rumah Pangan B2SA menjadi beberapa opsi yang diambil untuk memperkenalkan pola makan sehat sejak dini serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengonsumsi pangan lokal.

Lebih lanjut pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional berkomitmen mengembangkan Desa B2SA dan meperluas cakupan Rumah Pangan B2SA sebagai langkah strategis dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan. Program Desa B2SA sendiri akan menyasar 809 lokasi di 50 kabupaten/kota. Sedangkan Rumah Pangan B2SA akan dilaksanakan menggunakan dana dekonsentrasi untuk 47 lokasi di seluruh Indonesia. Adapun lokasi yang dipilih merupakan prioritas utama dalam upaya penanganan daerah rentan rawan pangan, sejalan dengan visi pemerataan akses pangan B2SA bagi seluruh masyarakat

5. Kegiatan B2SA *Goes to School* di SDN Kayu Putih 08 Pagi, Jakarta Timur

Kegiatan B2SA *Goes to School* (BGTS) dilaksanakan di SDN Kayu Putih 08 Pagi, Jakarta Timur pada hari Rabu, 19 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Islamic Festival Ramadhan yang bertujuan untuk memberikan

edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya konsumsi pangan yang B2SA.

Acara ini dihadiri oleh para guru dan siswa/i SDN Kayu Putih 08 Pagi serta perwakilan dari Direktorat 3.1. Sosialisasi pangan B2SA disampaikan melalui pemaparan materi tentang pola konsumsi yang sesuai dengan prinsip B2SA, serta permainan edukatif (edu games) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai konsep "Isi Piringku".

Sebagai bentuk dukungan, Direktorat 3.1 menyediakan konsumsi menu B2SA sebanyak 260 box, membagikan 260 buah mug bertema B2SA, serta memberikan doorprize kepada peserta yang aktif dalam edu games. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan konsumsi pangan yang sehat sejak dini serta meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai pentingnya pola makan yang seimbang dan aman.

6. Kegiatan B2SA *Goes to School* di SD IT Insan Rabbani Bekasi (20 Maret 2025)

Kegiatan B2SA Goes to School (BGTS) dilaksanakan di SD IT Insan Rabbani Bekasi pada hari Kamis, 20 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pesantren Kilat Spirit Ramadhan's Legion VI yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Kegiatan ini diikuti oleh siswa/i dari kelas 1 hingga 6, para guru, panitia dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah, serta perwakilan dari Direktorat 3.1. Dalam

mendukung kegiatan ini, Direktorat 3.1 memberikan bantuan berupa 260 paket konsumsi B2SA, 260 mug B2SA, banner edukasi mengenai pola makan B2SA, serta doorprize untuk peserta yang aktif.

Sosialisasi dilakukan dengan penyampaian materi mengenai pola pangan B2SA serta edu games interaktif agar anak-anak lebih memahami konsep konsumsi pangan yang sehat dan seimbang. Selain itu, banner yang diberikan kepada pihak sekolah diharapkan dapat menjadi media edukasi yang berkelanjutan dalam memperkenalkan konsep pangan B2SA kepada seluruh siswa. Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran anak-anak sejak dini mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi.

7. Kegiatan Sosialisasi B2SA pada *Kitchen of Kindness* SMA Labschool Kebayoran Jakarta

Pada Sabtu, 22 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi B2SA dalam rangka *Kitchen of Kindness* di SMA Labschool Kebayoran Jakarta. Kitchen of Kindness merupakan kegiatan memasak hidangan berbuka puasa dengan menu B2SA, yang dilakukan oleh 55 siswa-siswi SMA Labschool. Hidangan yang telah dimasak kemudian didistribusikan kepada yayasan yatim piatu yang membutuhkan.

Direktorat 3.1 turut mendukung kegiatan ini dengan menyediakan bahan pangan yang digunakan dalam proses memasak. Sebelum kegiatan memasak dimulai, tim dari Direktorat 3.1 memberikan pembekalan kepada para siswa melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pola konsumsi B2SA serta tata cara pengolahan

makanan yang baik dan aman. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep B2SA, Direktorat 3.1 juga mengadakan edugames interaktif menggunakan platform Kahoot!. Metode ini mendapat respons yang sangat antusias dari para siswa, yang terlihat aktif dan bersemangat dalam mengikuti permainan edukatif tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA serta membangun kepedulian sosial melalui aksi nyata dalam penyediaan makanan sehat bagi masyarakat yang membutuhkan.

8. Koordinasi Pengembangan Sorgum dengan Universitas Pasundan

Dalam mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal Badan Pangan Nasional terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah kerja sama dengan Universitas Pasundan (Unpas) dalam pengembangan sorgum sebagai alternatif pangan yang bernilai gizi tinggi dan berkelanjutan. Diversifikasi pangan tidak hanya menjadi upaya mengatasi ketergantungan pada beras dan gandum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun sistem pangan yang lebih resilien. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras dan gandum.

Upaya pengembangan dan pemanfaatan komoditas pangan lokal seperti sorgum, singkong, dan umbi-umbian sebagai alternatif utama. Indonesia memiliki

potensi besar dalam diversifikasi pangan, untuk itu perlu sinergi antara pemerintah, akademisi, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 25 Maret 2025 dilaksanakan Audiensi dengan Unpas di Bandung Jawa Barat dihadiri langsung oleh Rektor Unpas, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc. Pada kesempatan tersebut, Unpas berkomitmen untuk mendukung diversifikasi pangan melalui kajian akademik dan inovasi teknologi pangan.

Pemanfaatan sorgum sebagai sumber pangan lokal harus dikembangkan dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup riset dan pengembangan varietas unggul, optimalisasi produksi di lahan kering, serta penguatan industri pengolahan agar sorgum dapat menjadi bahan pangan yang kompetitif di pasar domestik maupun global.

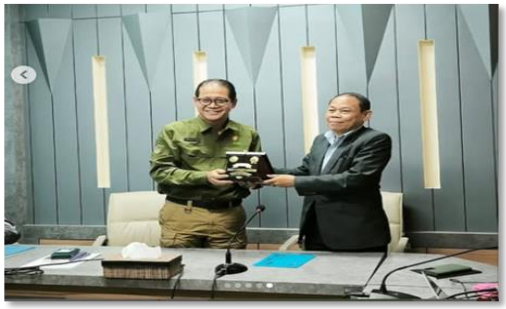

B. Kegiatan dalam Rangka Menghadiri Undangan

1. Menghadiri Pertemuan Koordinasi Penyusunan Standar Beras Fortifikasi

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Standar Beras Fortifikasi dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 di Kantor Badan Pangan Nasional. Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta dihadiri oleh Direktur 3.2, Asisten Deputi Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, *Representative and Country Director* WFP, serta perwakilan dari

Bappenas, Kementerian Kesehatan, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan asosiasi. Pertemuan bertujuan untuk melakukan penandatanganan *Joint Work Plan* 2025 antara Badan Pangan Nasional dan WFP terkait penyelenggaraan fortifikasi beras pada tahun 2025, serta membahas overview penyusunan standar beras fortifikasi.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyampaikan bahwa implementasi penyaluran beras fortifikasi dapat mendukung berbagai program seperti Makanan Bergizi Seimbang (MBG), bantuan pangan, serta operasi pasar melalui Beras SPHP. Adapun ruang lingkup persyaratan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Beras Fortifikasi mencakup beberapa aspek utama, yaitu ruang lingkup, acuan normatif, dan definisi; persyaratan bahan baku dan bahan tambahan makanan; metode dan rasio pencampuran; cara produksi pangan yang baik; pengemasan, penyimpanan, dan distribusi; pelabelan yang mencakup informasi bahan baku, nilai gizi, cara penyiapan, penyimpanan, dan peringatan; serta pengambilan contoh dan metode uji.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan BUMN mendukung diterbitkannya SNI Kernel Beras Fortifikasi dan RSNI Beras Fortifikasi. Kemenko Pangan menekankan bahwa agar beras fortifikasi dapat masuk ke dalam program MBG, perlu adanya intervensi atau insentif dari pemerintah karena harga beras fortifikasi lebih mahal. Selain itu, beras yang digunakan dalam program MBG berasal dari koperasi atau petani, bukan dari BUMN atau BUMD. Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa perbedaan harga beras fortifikasi yang diproduksi oleh swasta dan BUMN menjadi kendala utama dalam penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait kernel beras. Perpadi menegaskan bahwa fortifikasi belum perlu diwajibkan saat ini dan menyarankan agar kualitas gabah tetap dijaga untuk menghasilkan beras fortifikasi yang baik serta dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk fortifikasi beras, serta pemantauan dan pengawasan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi, peserta pertemuan juga menyarankan agar harga beras fortifikasi dimasukkan ke dalam standar.

2. Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kasus Keamanan Pangan pada Program Makan Bergizi Gratis

Pada tanggal 5 Maret 2025, telah dilaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut kasus keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK secara daring. Rapat ini dibuka oleh Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan serta dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kemenko Pangan, Bappenas, Kemenkes, Kemendikdasmen, BPOM, Badan Gizi Nasional, Bapanas, serta Dinas Kesehatan dan SPPG dari beberapa daerah, seperti Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Waingapu, Kota Kupang, dan Kabupaten Pandeglang.

Rapat ini bertujuan untuk membahas kasus keracunan pangan yang terjadi dalam penyelenggaraan program MBG di beberapa lokasi serta langkah-langkah penanganannya. Dalam diskusi, disimpulkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mencegah kejadian keracunan makanan dalam program MBG. Namun, masih terdapat beberapa kasus yang dilaporkan di berbagai daerah. Pelaksanaan MBG sendiri masih bervariasi di tiap daerah, di mana beberapa daerah sudah memiliki koordinasi dan sosialisasi SOP dengan para pemangku kepentingan, sementara di daerah lain koordinasi antara SPPG dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan masih belum optimal.

Sebagian besar informasi mengenai kasus keracunan pangan berasal dari media, yang terkadang berbeda dengan laporan dari pihak sekolah. Prosedur pelaporan kasus keracunan pangan masih mengikuti mekanisme yang sama, terutama dalam hal pengiriman sampel makanan dan parameter pengujian. Namun, investigasi yang dilakukan belum memasukkan studi epidemiologi yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif. Selain itu, data cakupan penerima manfaat program MBG di satuan pendidikan belum disampaikan oleh SPPG (BGN) kepada Kemendikdasmen, sehingga pemetaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kemendikdasmen saat ini tengah membangun dashboard data terkait pelaksanaan MBG, namun sistemnya masih manual dan mengalami kendala dalam

pengumpulan data dari unit pendidikan. Sementara itu, petunjuk teknis pelaksanaan MBG telah disusun oleh Kemendikdasmen dan akan segera disosialisasikan kepada satuan pendidikan yang telah menerima intervensi. Di sisi lain, pelaksanaan program MBG masih belum secara maksimal mengedukasi peserta didik mengenai kebiasaan makan yang baik, sehat, dan bergizi.

III.2.2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

A. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan

1. Mengikuti Pertemuan Pembahasan Posisi Indonesia pada Sidang *Codex Committee on Food Additive*

Badan Pangan Nasional ikut berpartisipasi dalam pembahasan posisi Indonesia pada Sidang ke-55 *Codex Committee on Food Additives* (CCFA) yang diselenggarakan oleh BPOM secara daring pada tanggal 5 Maret 2025. Rapat bertujuan untuk membahas posisi Indonesia pada sidang ke-55 CCFA yang diselenggarakan tanggal 24 – 28 Maret 2025 di Seoul, Korea Selatan. BPOM menyampaikan bahwa Indonesia tidak mengirimkan delegasi pada Sidang tersebut, namun tetap akan menyampaikan posisi. Sidang dapat diikuti melalui webcast pada website Codex.

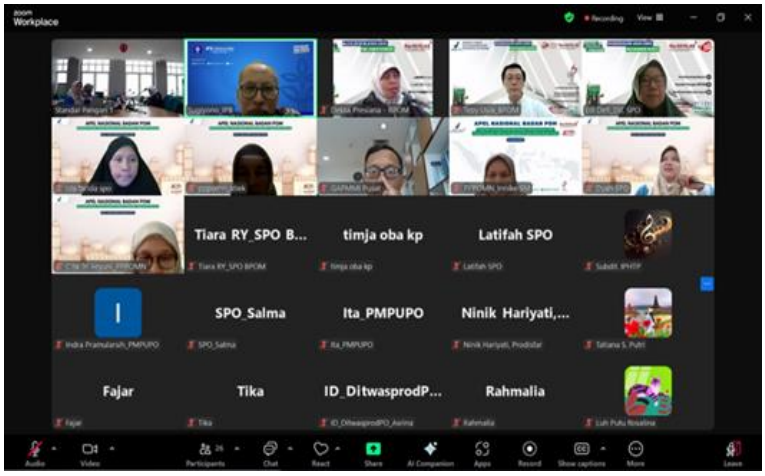

Agenda yang dibahas dalam pertemuan diantaranya adalah Agenda 2-*Matters Referred by the Codex Alimentarius Commission and Other Subsidiary Bodies*, Agenda 5-*General Standard for Food Additive,* Agenda 7-*Proposal for additions and change to the priority list of substance proposed for evaluation by JECFA* dan Agenda 9-*General Standard for Food Additive* (GSFA) sebagai *single reference* untuk BTP. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Indonesia akan berposisi melalui CRD yang dikoordinir oleh BPOM.

2. FGD Penggunaan Pemanis pada Buah Segar

Sebagai Lembaga Pemerintah yang menangani pangan, Bapanas melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) memiliki mandat penting dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) keamanan pangan segar untuk menjamin perlindungan konsumen serta mewujudkan sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Salah satu isu strategis pangan segar yang masih menjadi perdebatan adalah penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Untuk itu telah dilaksanakan pertemuan Pembahasan Penggunaan BTP Pemanis pada Buah Segar secara daring di Ruang Direktorat pada tanggal 19 Maret 2025.

Pertemuan yang dibuka dan dipimpin oleh Direktur PSKMP dan dihadiri oleh Pakar dari IPB (Prof. Sugiyono dan Prof. Nuri Andarwulan), beserta staf Direktorat PSKMP bertujuan untuk membahas pengajuan penambahan BTP pemanis glikosida steviol (stevia) dan sukralosa pada tomat ceri, tomat beef, stroberi, dan jagung, serta penambahan BTP pemanis stevia pada stroberi dan jagung.

Penggunaan BTP dapat dilakukan dengan beberapa tujuan, salah satunya adalah meningkatkan mutu dan stabilitas pangan, serta memperbaiki sifat-sifatnya, tanpa mengubah sifat aslinya sehingga dapat menyesatkan konsumen. Sebagai pertimbangan lainnya, penggunaan BTP pemanis berpotensi mendorong praktik penggunaan yang salah bagi masyarakat. Selain itu, perendaman buah dan sayur dalam larutan BTP pemanis akan terserap ke dalam daging buah dan sayur sehingga berpotensi melebihi batas aman yang dapat dikonsumsi (*Acceptable Daily Intake*/ADI). Berdasarkan pertimbangan dari sisi regulasi dan sains dari para pakar, dapat disimpulkan bahwa BTP pemanis stevia dan sukralosa tidak dapat digunakan pada buah dan sayur segar.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat PSKMP menerbitkan rekomendasi yang disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkutan melalui Dinas Pangan Provinsi. Selain itu, rekomendasi ini menjadi acuan perizinan dan pengawasan keamanan pangan pada buah dan sayur.

3. Rapat Internal Pembahasan EWG Vanilla dan Kayu Manis

Badan Pangan Nasional selaku Koordinator *Mirror Committee* (MC) untuk *Codex Committee on Spices and Culinary Herbs* (CCSCH) berupaya untuk terlibat aktif dalam *Electronic Working Group* (eWG) terkait penyusunan draf standar untuk vanila dan kayu manis. Untuk itu telah dilaksanakan rapat internal pembahasan EWG vanilla dan kayu manis pada tanggal 25 Maret 2025 di Ruang Direktorat PSKMP. Pertemuan ini dilaksanakan untuk pembahasan posisi Indonesia atas draft standar vanila pada forum EWG sirkulasi ke-2 dan persiapan pembahasan draf standar kayu manis pada forum *Chair* dan *Cochair* kayumanis.

Posisi Indonesia pada forum EWG untuk draf standar vanila memberikan komen pada lingkup *style*, *Food Additives*, *Labelling* yaitu dalam hal *Name of Product* dan *Country of Origin and country of harvest*, *Sampling plan*. Selain itu Indonesia memberikan komen pada *Annex* 1 *Option* 1. Indonesia mengomentari penggunaan sampel dalam *wet basis*. Perdagangan internasional didasarkan pada *dry basis* daripada *wet basis*. Oleh karena itu, diusulkan agar pengujian kadar vanila mengikuti standar *dry basis*, sejalan dengan produk rempah-rempah lain dalam lingkup CCSCH. Angka-angka dalam tabel saat ini didasarkan pada *dry basis*, dan setiap perubahan ke *wet basis* memerlukan pengajuan ulang. Sesuai TOR CCSCH, standar global untuk rempah-rempah dan herbal kuliner ditetapkan dalam bentuk kering atau dehidrasi. Penggunaan *wet basis* akan memerlukan konversi yang mempertimbangkan kadar air.

Selanjutnya posisi Indonesia untuk *draft vanilla standar step 6* dikirimkan melalui platform EWG pada tanggal 27 Maret 2025.

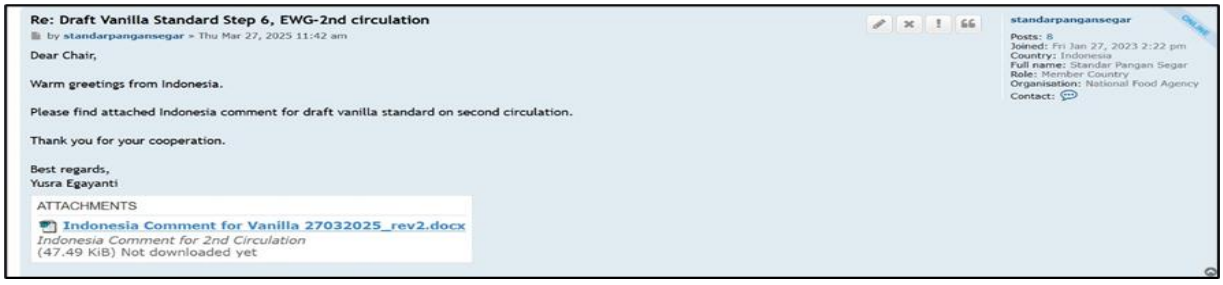
Re: Draft Vanilla Standard Step 6, EWG-2nd circulation

by standarpangansegar » Thu Mar 27, 2025 11:42 am

Dear Chair,

Warm greetings from Indonesia.

Please find attached Indonesia comment for draft vanilla standard on second circulation.

Thank you for your cooperation.

Best regards,
Yusra Egayanti

ATTACHMENTS

Indonesia Comment for Vanilla 27032025_rev2.docx
Indonesia Comment for 2nd Circulation
(47.49 KiB) Not downloaded yet

standarpangansegar
Posts: 8
Joined: Fri Jan 27, 2023 2:22 pm
Country: Indonesia
Full name: Standar Pangan Segar
Role: Member Country
Organisation: National Food Agency
Contact:

Sedangkan untuk kayumanis, akan disusun matriks terkait masukan Indonesia sebelumnya dan masukan beberapa negara, untuk kemudian dibahas bersama para pakar dan pelaku usaha.

4. Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Periode Maret 2025

Direktorat Perumusan Standar Keamanan telah menerbitkan sebanyak 9 rekomendasi hasil kajian dan pembahasan sejak awal tahun 2025. Sedangkan selama Bulan Maret 2025, telah diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi hasil kajian dan pembahasan, yaitu: Rekomendasi Penggunaan Stevia dan Sukralosa sebagai BTP pada PSAT serta Rekomendasi Analisa Parameter Produk Kacang Hitam (Vigna Mungo) Asal dari Negara Myanmar.

Semua rekomendasi yang dihasilkan telah dimuat dalam website Badan Pangan Nasional dengan link berikut **https://badanpangan.go.id/tabelrhk.**

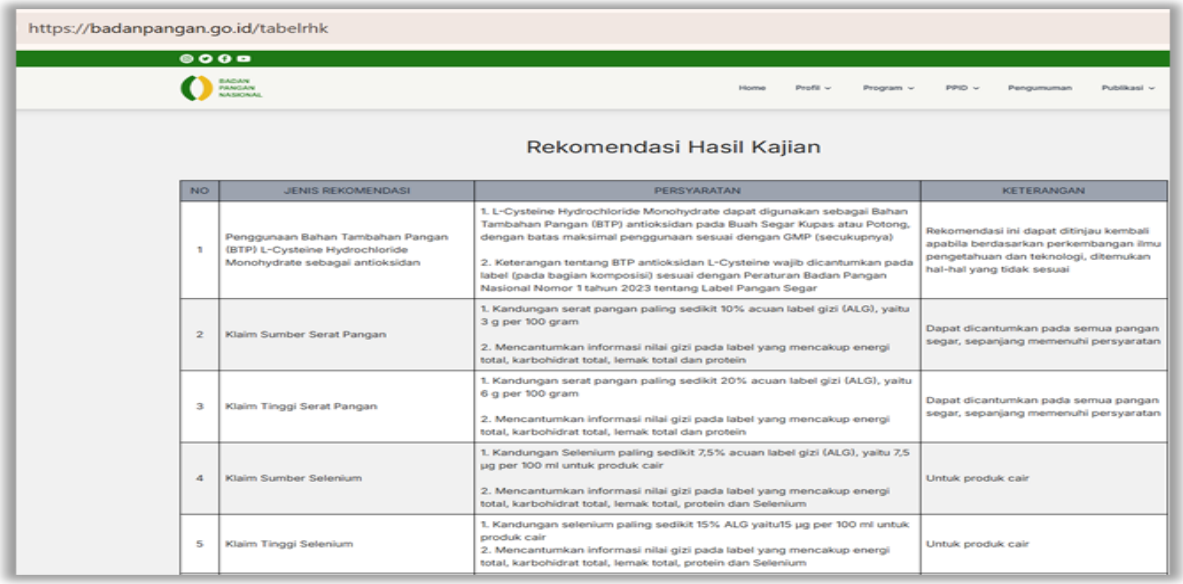
https://badanpangan.go.id/tabelrhk

Home Profil Program PPID Pengumuman Publikasi

Rekomendasi Hasil Kajian

NO	JENIS REKOMENDASI	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate sebagai antioksidan	1. L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate dapat digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) antioksidan pada Buah Segar Kupas atau Potong, dengan batas maksimal penggunaan sesuai dengan GMP (secukupnya) 2. Keterangan tentang BTP antioksidan L-Cysteine wajib dicantumkan pada label (pada bagian komposisi) sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 tahun 2023 tentang Label Pangan Segar	Rekomendasi ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
2	Klaim Sumber Serat Pangan	1. Kandungan serat pangan paling sedikit 10% acuan label gizi (ALG), yaitu 3 g per 100 gram 2. Mencantumkan informasi nilai gizi pada label yang mencakup energi total, karbohidrat total, lemak total dan protein	Dapat dicantumkan pada semua pangan segar, sepanjang memenuhi persyaratan
3	Klaim Tinggi Serat Pangan	1. Kandungan serat pangan paling sedikit 20% acuan label gizi (ALG), yaitu 6 g per 100 gram 2. Mencantumkan informasi nilai gizi pada label yang mencakup energi total, karbohidrat total, lemak total dan protein	Dapat dicantumkan pada semua pangan segar, sepanjang memenuhi persyaratan
4	Klaim Sumber Selenium	1. Kandungan Selenium paling sedikit 7,5% acuan label gizi (ALG), yaitu 7,5 µg per 100 ml untuk produk cair 2. Mencantumkan informasi nilai gizi pada label yang mencakup energi total, karbohidrat total, lemak total, protein dan Selenium	Untuk produk cair
5	Klaim Tinggi Selenium	1. Kandungan selenium paling sedikit 15% ALG yaitu15 µg per 100 ml untuk produk cair 2. Mencantumkan informasi nilai gizi pada label yang mencakup energi total, karbohidrat total, lemak total, protein dan Selenium	Untuk produk cair

B. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

1. Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch-3

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bapanas selain berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), juga menginisiasi komunikasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk berkontribusi dalam pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Bapanas juga diminta untuk menyiapkan 34 orang tenaga pengajar dari 17 provinsi dalam kegiatan ToT yang akan mentransfer pengetahuan ke banyak tenaga pengajar di provinsinya masing-masing dalam kegiatan diklat SPPI Batch 3 pada bulan Juni - Juli 2025. Oleh karena itu, Bapanas akan terlibat aktif dalam koordinasi identifikasi ketersediaan

tenaga pengajar penjaminan keamanan pangan dan penganekaragaman pangan pada masing-masing Dinas Provinsi dan memastikan bahwa penyampaian ilmu (*sharing knowledge*) kepada tenaga pengajar lainnya terlaksana sebelum Diklat Manajerial SPPI Batch-3 dilaksanakan.

Dalam rangka koordinasi tersebut, dilakukan kunjungan koordinasi ke Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Maret 2025. Kunjungan koordinasi dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat (Pusdik Penerbad) Semarang. Pelaksanaan Diklat SPPI Batch-3 di Provinsi Jawa Tengah berada pada 5 titik lokasi di 4 kabupaten/kota yaitu Kota Semarang, Magelang, Purwokerto dan Surakarta (2 tilok). Untuk Kota Semarang, diklat dilaksanakan di Pusdik Penerbad yang dialokasikan menampung 200 orang siswa. Berdasarkan kegiatan koordinasi tersebut, tim DKP Provinsi Jateng akan terus menjaring calon tenaga pengajar sampai mencukupi kebutuhan 90 orang untuk mengajar hampir 3000 siswa se-Provinsi Jateng. Selanjutnya tim pengajar Kota Semarang akan membahas penggunaan kelas di Pusdik Penerbad yang paling efektif, dimana persiapan yang telah dilakukan tim pengajar Provinsi Jateng akan dijadikan lesson learn untuk provinsi lainnya. Sedangkan Bapanas akan terus memantau persiapan penyelenggaraan Diklat SPPI di 16 provinsi lainnya, khususnya untuk bahan materi ajar.

2. Penyampaian Keanggotaan Tim dan Usulan Tema Podcast Kedeputian 3 Tahun 2025

Terkait perencanaan pelaksanaan *Podcast* B2SA 2025, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah menyampaikan Nota Dinas terkait Keanggotaan Tim dan Usulan Tema *Podcast* Kedeputian 3 Tahun 2025 kepada Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada tanggal 11 Maret 2025. Saat

ini sedang berproses menyusun SK pelaksana kegiatan *podcast* dan tema-tema *podcast* dan masih menunggu usulan nama-nama anggota tim dari direktorat lingkup Deputi 3.

3. Pelatihan BTSF *Sampling and Analysis Mycotoxins*

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)

NOTA DINAS

Nomor: 200/HM.01.02/D.2/03/2025

Yth. : 1. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
Dari : Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
Hal : Keanggotaan Tim dan Usulan Tema Podcast Kedeputian 3 Tahun 2025
Tanggal : 11 Maret 2025

Dalam rangka sosialisasi dan edukasi terkait penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan tahun 2025, maka diperlukan pembaruan Tim Kerja Pengelola Podcast Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terdiri dari perwakilan tiap Direktorat di Kedeputian 3.

Sehubungan hal tersebut, mohon Saudara dapat menugaskan minimal 2 orang staf yang berkompeten untuk bersama-sama mengelola Podcast dan masuk dalam rancangan SK Tim Kerja Pengelola Podcast Kedeputian 3 Tahun 2025. Selain itu, mohon Saudara juga menyampaikan rancangan tema Podcast paling sedikit 3 (tiga) tema selama tahun 2025.

Kami sangat berterimakasih bila usulan anggota tim dan rancangan tema tersebut dapat disampaikan **paling lambat Jumat, 14 Maret 2025**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Yusra Egayanti

Tembusan:
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Badan Pangan Nasional

Pengawasan keamanan pangan di Indonesia terus menghadapi tantangan, hal itu tak lepas dari terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika global. Untuk merespon tantangan tersebut, Bapanas telah mengirimkan wakilnya dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Uni Eropa dalam program *Better Training for Safer Food* (BTSF) *Initiative*, dengan topik "*Sampling and Analysis: Mycotoxin*" yang dilaksanakan pada 10-21 Maret 2024 di Madrid, Spanyol. Pelatihan ini diikuti oleh peserta sebanyak 15 orang dari 11 negara (Indonesia, Thailand, Brazil, Republik Dominika, Argentina, Kolombia, Georgia, Maroko, Tunisia, Ghana dan Sudan).

Pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara non-EU yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku di Uni Eropa, serta mengembangkan kemampuan staf dan manajemen laboratorium dalam menerapkan metode pengambilan sampel dan analisis yang digunakan dalam pengawasan keamanan pangan, khususnya terkait cemaran mikotoksin. Pelatihan

menghadirkan narasumber ahli dari berbagai negara di Uni Eropa sebagai tutor, dan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi studi kasus secara berkelompok, praktik analisis mikotoksin di laboratorium serta *site visit* ke pasar dan *border control post*. Materi yang disampaikan didasarkan pada regulasi, buku panduan/pedoman dan pengalaman negara-negara Uni Eropa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan internasional ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan dan kolaborasi Indonesia dengan organisasi internasional dalam upaya menjamin keamanan pangan di masyarakat.

4. Pelatihan *BTSF Sanitary and Phytosanitary Framework for Non European Union Countries*

Dalam rangka mendukung penguatan kompetensi SDM bidang keamanan pangan, Bapanas berpartisipasi dalam Pelatihan BTSF *Sanitary and Phytosanitary framework non-EU countries Regional Workshop on EU import requirements and controls of food of animal origin*. Pelatihan diselenggarakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 24-28 Maret 2025 di Bangkok, Thailand dan dihadiri oleh 40 peserta dari 9 negara non-EU. Indonesia mengirimkan 5 peserta yaitu dari NFA, BPOM dan Barantin.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman otoritas kompeten di bidang keamanan pangan khususnya dalam *food safety control system*. Dalam pelatihan ini dijelaskan terkait regulasi EU tentang *sanitary and phytosanitary measure* (SPS), kesehatan hewan, sertifikat masuk ke EU, kriteria mikrobiologi, residu obat hewan dan pestisida, kontaminan pada hewan dan produk asal hewan, rencana pengendalian residu, dan verifikasi keefektifan kontrol resmi terhadap produk yang akan diekspor ke EU.

5. Sosialisasi Peraturan Keamanan Pangan

Dalam rangka menyamakan persepsi terkait implementasi regulasi keamanan pangan segar dan memastikan implementasi regulasi dapat diterima dan dijalankan secara efektif di seluruh rantai pasok pangan segar, telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Sedar di Peredaran dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan secara online pada tanggal 14 Maret 2025. Sosialisasi ini diikuti oleh petugas OKKPD 38 Provinsi, pelaku usaha dan dari instansi terkait seperti Karantina dan Kementan. Adapun hal-hal penting dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Dengan telah diundangkannya dua Perbadan ini, maka pengawasan pangan segar baik dalam penjaminan dan pengawasan di peredaran khususnya untuk pemenuhan persyaratan batas maksimal cemaran dan residu pestisida mengacu pada kedua perbadan tersebut;
- Perlu adanya harmonisasi regulasi khususnya dengan Badan Karantina Indonesia terkait implementasi persyaratan batas maksimal cemaran dan residu pestisida untuk produk yang masuk ke Indonesia; dan
- Kemampuan pengujian laboratorium didorong agar dapat menyesuaikan dengan persyaratan Batas Maksimal Cemaran (BMC) dan Batas Maksimal Residu (BMR) yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, Bapanas akan melakukan koordinasi dengan Badan Karantina Indonesia untuk harmonisasi regulasi terkait BMC dan BMR pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di pintu pemasukan produk impor.

6. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut PPNS Bidang Pangan

Sehubungan dengan telah dilantiknya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pangan Angkatan I (satu) Bapanas pada Februari 2025 lalu, telah

dilaksanakan Pertemuan Tindak Lanjut PPNS antara Biro Organisasi, SDM dan Hukum dengan Direktorat Teknis Pengampu PPNS yakni Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada tanggal 18 Maret 2025, bertempat di RR Nusantara II Bapanas.

Rapat dihadiri oleh Kepala Biro OSH, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Koordinator Organisasi, dan PPNS Badan Pangan Nasional. Adapun hal yang dibahas dalam pertemuan ini adalah untuk merumuskan tata laksana operasional kegiatan PPNS Bidang Pangan Bapanas. Pada pertemuan ini diperoleh beberapa kesepakatan yakni diperlukan payung hukum dalam bentuk keputusan Kabadan terkait struktur dan fungsi organisasi PPNS Bapanas, serta dalam rangka memperdalam kegiatan penyidikan dan mengidentifikasi kebutuhan operasional PPNS, Bapanas perlu mempelajari *best practices* kegiatan PPNS dari K/L lain serta mengundang pihak-pihak terkait seperti Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya adalah menyampaikan laporan hasil pertemuan kepada Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan menyusun nota dinas kepada Sestama dalam rangka dukungan legalitas, operasional, dan sarana prasarana PPNS Bapanas. Kemudian Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan menginisiasi penyusunan SK Kabadan terkait struktur dan tata laksana organisasi PPNS Bidang Pangan Bapanas dengan target maksimal bulan Juli 2025 sehingga diharapkan Semester 2 tahun 2025 kegiatan PPNS sudah dapat berjalan.

7. Menghadiri Sosialisasi Aplikasi E-PPNS

Dalam menjalankan tusinya mengawal penyelenggaraan pangan, PPNS Bidang Pangan perlu berkoordinasi dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Admin/operator PPNS Bidang Pangan menghadiri pertemuan sosialisasi penggunaan aplikasi e-PPNS yang dikembangkan oleh Biro Korwas PPNS pada tanggal 19 Maret 2025 di Bareskrim Polri, Jakarta.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bagwassidik dan tim korwas PPNS, tim pengembang aplikasi serta perwakilan operator dan/atau PPNS dari tiap K/L. Pertemuan dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi e-PPNS Bareskrim Polri yang dipandu oleh tim pengembang. Aplikasi dapat diakses melalui tautan https://eppns.bareskrim.polri.go.id/. Aplikasi tersebut digunakan oleh admin/operator, penyidik dan atasan PPNS sesuai fungsinya masing-masing. Di dalamnya terdapat beberapa fitur untuk membuat laporan kejadian (LK) dan pemantauan perkembangan kasus yang ditangani.

Sampai tanggal 27 Maret 2025 telah dilantik sebanyak 28 orang PPNS Bidang Pangan dari pusat dan daerah, baik yang dilantik di kantor Kemenkum pusat maupun Kantor Wilayah Kemenkum masing-masing. Sedangkan 2 orang PPNS Bidang Pangan lainnya (Sumatera Barat dan Riau) masih menunggu jadwal pelantikan oleh Kanwil masing-masing.

8. Pemantauan dan Evaluasi Pasokan dan Harga Pangan serta Keamanan Pangan HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025

Dalam upaya mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga dan stok ketersediaan pangan aman, dilakukan pemantauan dan evaluasi pasokan dan harga pangan serta keamanan pangan HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang dirancang oleh Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tanggal 18 Maret -17 April 2025. Tim pemantauan dibagi berdasarkan wilayah dari tiap unit Eselon 1 ditetapkan oleh SK Kabadan, masing-masing unit kerja diminta mengisi wilayah, pelaksana, waktu pelaksanaan dan lain-lain melalui matriks online

yang sudah disiapkan Direktorat SPHP. Pelaksanaan pemantauan/monitoring tahun ini dilaksanakan secara *hybrid* dan dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja. Periode pemantauan dimulai dari SK ditandatangani sampai tanggal 18 Maret 2025.

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melakukan pemantauan di tiga Provinsi yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Lampung pada tanggal 24 Maret 2025 dengan berkoordinasi dengan petugas di masing-masing provinsi tersebut. Ketiga provinsi tersebut berkomitmen melaksanakan pemantauan harga dan pasokan pada minggu pertama setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 dengan mengisi kuisioner yang telah disampaikan. Dan Lampung telah mengirimkan hasil pemantauan sebelum libur Idul Fitri 28 Maret 2025.

C. Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan.

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Beras Fortifikasi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9314:2024 tentang Kernel Beras Fortifikan. Terkait kebijakan pemanfaatan standar beras fortifikasi, Bapanas menjalin kerja sama dengan *World Food Programme* (WFP) dan telah membahas *work plan table* untuk tahun 2025. Untuk itu dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar beras fortifikasi di Jakarta pada 4 Maret 2025. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka penandatanganan *Joint Work Plan* 2025 antara WFP dan Bapanas, dengan ruang lingkup kerja sama dalam penyusunan standar fortifikasi beras. Penandatanganan *Joint Work Plan* 2025 dilakukan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Jennifer Rosenzweig selaku *Representative and Country Director* WFP Indonesia.

Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Pakar, perwakilan anggota komtek 67-11, Kemenko Pangan, Bappenas, Koalisi Fortifikasi Indonesia, Kemenkes, BSN, WFP, Mitra Pembangunan (*Nutrition* International, GAIN, UNICEF), pelaku usaha dan asosiasi (Bulog, ID Food, Perpadi, Food Station, RNI), serta lingkup Bapanas. Pada pertemuan ini, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan melakukan perbaikan draft RSNI beras fortifikasi sesuai dengan masukan K/L dan *stakeholder* serta data dukung ilmiah dan bekerja sama dengan WFP untuk melaksanakan proses penyusunan RSNI tersebut.

2. Mengawal Pembahasan RPP Revisi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Salah satu amanah dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait label dan iklan pangan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dalam pasal 103 dan 107. Untuk itu, guna menjalankan amanah undang-undang tersebut perlu dilakukan revisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disesuaikan dengan UU No. 18 Tahun 2012. Penyusunan RPP tersebut diprakarsai oleh BPOM. Dalam Pasal 108 UU Pangan telah ditetapkan bahwa Badan Pangan Nasional diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap pangan segar termasuk aspek label dan iklan. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam mengawal jalannya pembahasan RPP tersebut dan telah menyampaikan usulan dan masukan melalui surat Plt. Sestama ke Sestama BPOM No.11/HK.02.02/A/01/2025 tanggal 3 Januari 2025.

Rapat pembahasan RPP Label dan Iklan Pangan telah dilakukan pada 6 Maret 2025. Sedangkan rapat pra PAK telah selesai dilaksanakan tanggal 13 Maret 2025 dan Bapanas aktif memberikan masukan terkait adanya tugas fungsi dan wewenang Bapanas yang diatur dalam RPP Label dan Iklan Pangan tersebut.

Selanjutnya akan dilakukan rapat PAK yang diprakarsai oleh BPOM dan masukan dari masing-masing K/L dapat disampaikan kembali sesuai dengan hasil rapat pra PAK.

3. Rapat Koordinasi Eselon I Pembahasan RPP tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Sehubungan dengan upaya percepatan penyelesaian *pending issue* penyusunan RPP Perubahan PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Eselon 1 oleh Kemenko Pangan, pada tanggal 14 Maret 2025 secara daring. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan–Kemenko Pangan, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan-BPOM, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan–Kementan, Asdep Perundang-undangan dan Administrasi Hukum–Kemensetneg, Plt. Sestama–Bapanas, dan Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Rapat ini bertujuan untuk membahas *pending issue* penyusunan RPP Perubahan PP No.86/2019 tentang Keamanan Pangan pada Pasal 47 ayat (2b) terkait pengawasan pangan olahan asal hewan, antara BPOM dan Kementan. Namun pada rapat ini, belum diperoleh kesepakatan rumusan Pasal 47 ayat (2b) antara BPOM dan Kementan. Sehingga diusulkan untuk dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang akan dilaksanakan pada 17 Maret 2025.

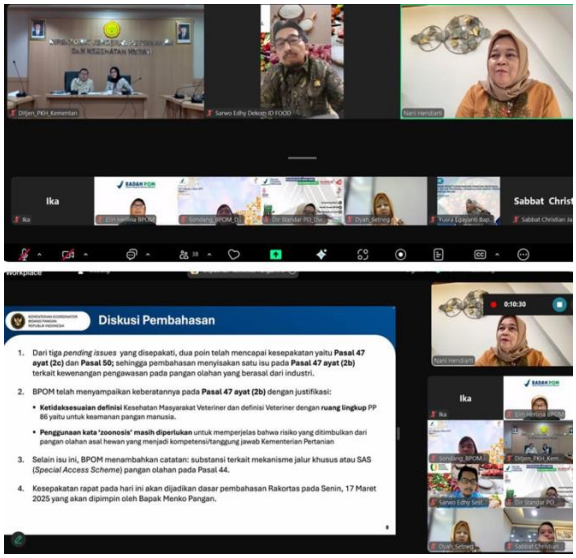

4. Menghadiri Rakortas Tingkat Menteri Pembahasan RPP tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Pembahasan rancangan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terus berlanjut secara intensif. Badan Pangan Nasional selaku pemrakarsa terus mengawal jalannya pembahasan RPP 86/2019

tersebut. Bapanas menghadiri Rakortas Tingkat Menteri Pembahasan RPP tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2025 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya pelaksanaan koordinasi pembahasan RPP Keamanan Pangan oleh Kemenko bidang Pangan dalam penyelesaian *pending issue* telah melalui rapat koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2025, 7 Februari 2025 dan 17 Maret 2025. Rakortas ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan serta dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, serta kepala K/L lainnya. Hasil dari pertemuan ini telah disepakati penyelesaian *pending*

issue ketentuan Pasal 47 ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), serta menambahkan ketentuan Pasal 47 ayat (5), dengan substansi bahwa pelaksanaan pengawasan selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Badan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan selesainya pembahasan dan penyelarasan substansi RPP tersebut, selanjutnya Bapanas selaku Pemrakarsa RPP perlu menyampaikan kembali usulan penetapan RPP tersebut.

5. Penyiapan Surat Permohonan Penetapan RPP tentang Perubahan atas PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Setelah diperoleh kesepakatan terkait *pending issue* pada Rakortas Tingkat Menteri Pembahasan RPP tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pada tanggal 17 Maret 2025, telah dilaksanakan rapat internal pembahasan RPP 86/2019 pada tanggal 26 Maret 2025. Rapat ini menindaklanjuti hasil kesepakatan pada Rakortas, dimana pasal-pasal yang menjadi *pending issue* telah disepakati. Hasil

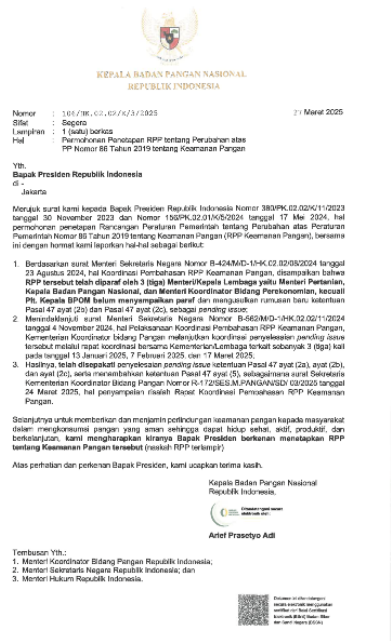

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 101/TK.03.03/K/3/2025 27 Maret 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penetapan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
di -
Jakarta

Merujuk surat kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Nomor 380/PK.02.02/K/11/2023 tanggal 30 November 2023 dan Nomor 150/PK.02.01/K/5/2024 tanggal 17 Mei 2024, hal permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (RPP Keamanan Pangan), bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-424/M/D-1/HK.02.02/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024, hal Koordinasi Pembahasan RPP Keamanan Pangan, disampaikan bahwa **RPP tersebut telah diparaf oleh 3 (tiga) Menteri/Kepala Lembaga yaitu Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kecuali Plt. Kepala BPOM belum menyampaikan paraf** dan mengusulkan rumusan baru ketentuan Pasal 47 ayat (2a) dan Pasal 47 ayat (2c), sebagai *pending issue*.
2. Menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-562/M/D-1/HK.02.02/11/2024 tanggal 4 November 2024, hal Pelaksanaan Koordinasi Pembahasan RPP Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator bidang Pangan melanjutkan koordinasi penyelesaian *pending issue* tersebut melalui rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 13 Januari 2025, 7 Februari 2025, dan 17 Maret 2025.
3. Hasilnya, telah **disepakati** penyelesaian *pending issue* ketentuan Pasal 47 ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), serta menambahkan ketentuan Pasal 47 ayat (5), sebagaimana surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor R-172/SES.M.PANGAN/03/2025 tanggal 24 Maret 2025, hal penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan RPP Keamanan Pangan.

Selanjutnya untuk memberikan dan menjamin perlindungan keamanan pangan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman sehingga dapat hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan, kami **mengharapkan kiranya Bapak Presiden berkenan menetapkan RPP tentang Keamanan Pangan tersebut** (naskah RPP terlampir)

Atas perhatian dan perkenan Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pangan Nasional
Republik Indonesia,

Arief Prasetyo Adi

Tembusan Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia; dan
3. Menteri Hukum Republik Indonesia.

pembahasan rapat internal tersebut ditindaklanjuti dengan menyiapkan surat permohonan penetapan ke Presiden dan draft RPP sesuai hasil pembahasan Rakortas. Selanjutnya surat permohonan penetapan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2025.

6. Mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Regulasi dan Optimalisasi Pelaksanaan MBG

Keamanan pangan segar dan peningkatan penganekaragaman pangan penting untuk dapat dipastikan dalam operasional harian MBG. Bapanas mengikuti rapat koordinasi pembahasan regulasi dan optimalisasi Pelaksanaan MBG oleh Kemenko Pangan pada 25 Maret 2025 secara daring, sebagai tindak lanjut Rakortas Tingkat Menteri tentang Program MBG yang dipimpin oleh Menko Pangan pada 3 Maret 2025. Rakor dihadiri oleh berbagai perwakilan K/L diantaranya KSP, Kemensetneg, Bappenas, BGN, Kemendagri, Kemendikdasmen, KemenKum, KemenUMKM, KemenLH, Kemenkop, Kemendes, Kemenhan, UNHAN, BPOM, dan Bapanas.

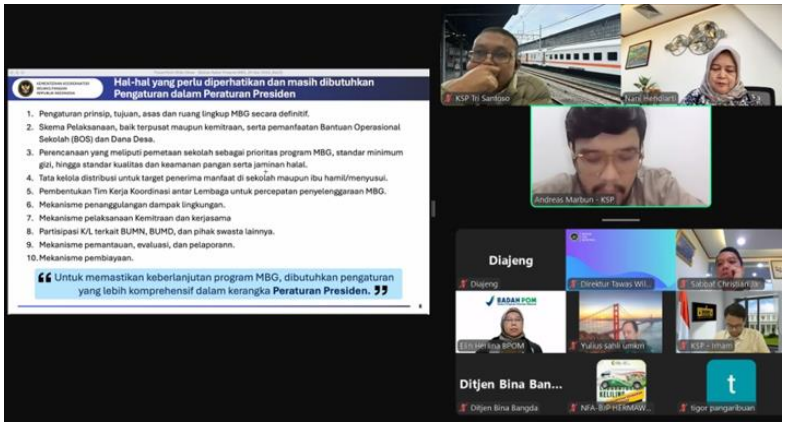

Rakor membahas tindak lanjut dan *updating* progress Rancangan Inpres dan Rancangan Perpres untuk pelaksanaan program MBG. Rancangan Inpres dibuat sebagai dasar pedoman bagi masing-masing K/L dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam optimalisasi MBG sesuai kewenangannya. Rancangan Perpres dibuat sebagai regulasi yang lebih rinci, seperti pembentukan tim kerja koordinasi percepatan penyelenggaraan MBG, penanggulangan dampak lingkungan, mekanisme pelaksanaan kemitraan dan kerjasama khususnya pihak swasta, mekanisme pemantauan evaluasi dan pelaporan, hingga pembiayaan.

Rancangan Inpres saat ini sudah selesai dan Biro Hukum BGN perlu menyampaikan rancangan tersebut kepada Presiden melalui Kemensetneg sebelum Idul Fitri. Forum rapat menyepakati bahwa Kemenko Pangan yang akan menjadi Pemrakarsa RPerpres tersebut, namun masih perlu dilaporkan kepada Menko

Pangan. Badan Pangan Nasional telah menyampaikan bahwa keterlibatan Bapanas selain di Penjaminan Keamanan Pangan dan Pelatihan SPPI, juga dalam Pasokan Pangan karena Bapanas tidak terlepas dari ID Food BUMN. Selain itu, Bapanas juga menyampaikan gagasan untuk membuat Tim Tanggap Cepat dalam rangka respon cepat terhadap kasus-kasus tertentu serta gagasan memasukkan program edukasi anak sekolah untuk makan bergizi dan pemanfaatan pangan sumber daya lokal.

D. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina

1. Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKKPD Provinsi

Dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan yang handal, Badan Pangan Nasional melakukan pemetaan kondisi sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar yang akan menjadi salah satu output indikator kinerja berupa persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar provinsi yang terstandarisasi, serta sebagai dasar dalam perencanaan pembinaan dan fasilitasi. Sampai saat ini 27 OKKPD Provinsi sudah dinilai, yang mana pada tahun 2024 sebagian kab/kota di dalamnya juga sudah dinilai. Dan pada tahun 2025 terdapat 7 OKKPD provinsi yang akan dinilai yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Pada Bulan Maret 2025 telah dilakukan penilaian penerapan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar OKKPD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4-6 Maret 2025 dan OKKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 10-

12 Maret 2025. Penilaian OKKPD dilakukan melalui verifikasi dokumen bukti dukung yang diunggah sesuai dengan Perbadan No 12 Tahun 2023. Bukti dukung yang dipersiapkan harus mencakup aspek Kelembagaan, SDM, Pelayanan Penjaminan, Pengawasan, Pendataan, Pembinaan, KIE, Sarana dan Prasarana, dan Anggaran. Adanya kolaborasi antara OKKP-Pusat dan OKKP-Daerah diharapkan dapat mewujudkan keamanan pangan nasional.

III.2.3 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

A. Kegiatan Koordinasi (Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan)

1. Pendampingan Persiapan Audit Rumah Kemas oleh GACC

Kegiatan pendampingan audit rumah kemas dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam persiapan audit oleh GACC yang dilaksanakan pada 10-13 Maret 2025. Rangkaian kegiatan dilaksanakan di Jakarta, Bogor, dan Sulawesi Tengah.

Pendampingan bertujuan untuk memastikan kesiapan rumah kemas PT Zarafa Ridho Lestari dalam pelaksanaan audit pada tanggal 10 Maret 2025.

Rumah kemas melakukan simulasi penanganan durian segar dengan tahapan:

- penerimaan bahan baku;
- Sortasi;
- pemeriksaan mutu 1;
- pembersihan 1;
- pembersihan 2;
- pemeriksaan mutu 2;
- grading;
- pengemasan, dan;
- distribusi.

B. PCA-Perizinan Produk (Sertifikat Sarana Dan Produk Pangan Segar)

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Perizinan produk atas Sertifikasi dan registrasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penerbitan SPPB PSAT dan Izin Edar PSAT-PL

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL.

Pada bulan Maret 2025, terdapat total 195 permohonan baru berupa 15 permohonan SPPB-PSAT dan 180 Izin Edar PSAT-PL. Permohonan yang diterbitkan OKPP-P pada bulan Maret sebesar 17 SPPB-PSAT dan 168 Izin Edar PSAT-PL sedangkan yang ditolak atau TMS sebanyak 5 SPPB-PSAT dan 26 Izin Edar PSAT-PL. Total akumulasi permohonan yang masuk dari Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 adalah sebanyak 149 SPPB-PSAT dan 989 Izin Edar PSAT-PL. Dari total 1.138 tersebut, sebanyak 563 permohonan sudah terbit dan 74 permohonan ditolak.

2. Audit Lapang SPPB-PSAT

Dalam menerbitkan SPPB-PSAT, salah satu tahapan yang dilakukan oleh Direktorat PPSKMP sebagai verifikator adalah audit lapang. Audit lapang bertujuan untuk melakukan verifikasi penerapan dengan dokumen yang diajukan pelaku usaha serta melakukan penilaian kesesuaian sanitasi higienis sesuai standar yang berlaku. Pada bulan Maret 2025, OKKPP telah melaksanakan audit lapang terhadap 7 pelaku usaha yang menangani PSAT asal importasi yaitu CV. Parivar Sejahtera, PT. Mitra Abadi Lancar, PT. Setia Pesona Indoagro, PT. Indoribon Bungamas Abadi, PT. Lancar Niaga, PT. Kaho Artha Sentosa, dan PT. Lantabura International.

3. Sidang Komisi Teknis

Salah satu proses penerbitan SPPB dilaksanakan penilaian melalui rapat komtek bertujuan untuk memberi rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higienis Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT), sehingga penerbitan melalui audit menjadi lebih obyektif, professional dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan semua auditor dapat memaparkan secara utuh gambaran masing-masing unit usaha yang telah diaudit, dan tim komtek dapat memberikan rekomendasi yang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan masukan terhadap penilaian proses penerbitan SPPB, pada bulan Maret 2025 telah dilaksanakan 1 (Satu) kali Komisi Teknis OKKPP pada 10 Maret 2025 secara hybrid.

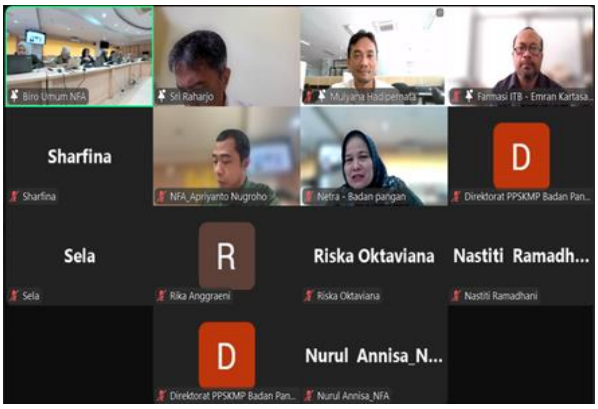

Pelaku usaha yang diajukan pada rapat Komtek 10 Maret 2025 berjumlah 6 (enam) pelaku usaha yaitu: PT Cerestar Flour Mills, CV XOSO, PT Dua Putra Perkasa Pratama, PT Felixindo Karya Agung, PT Triniti Maju Perkasa, dan PT Segar Kumala Indonesia.

Penilai atau pakar yang hadir dalam komtek 10 Maret 2025 yaitu: 1) IPB University oleh Dr. Rimbawan; 2)

Universitas Gadjah Mada oleh Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc; 3) Universitas Brawijaya oleh Prof. Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP; 4) Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Dr. Mulyana Hadipernata, S.TP., M.Sc; 5) Badan Karantina oleh Tri wahyu Cahya Rini; 6) Badan Pangan Nasional oleh Apriyanto Dwi Nugroho, S.T.P, M.Sc; 7) Badan Pangan Nasional oleh Netra Mirawati, SP., MP; 8) Badan Pangan Nasional oleh Tuty Anna Samosir, SP., MM.

Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Komisi Teknis OKKP-P sepakat untuk merekomendasikan kepada Ketua OKKP-P agar menerbitkan SPPB-PSAT bagi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Sidang Komisi Teknis pada 10 Maret 2025. Namun, sebelum penerbitan, pelaku usaha harus terlebih dahulu melengkapi perbaikan yang disarankan oleh Komisi Teknis OKKP-P.

4. Pendampingan Audit Kebun dan Rumah Kemas Durian oleh GACC

Pendampingan Audit GACC dilakukan di Kebun Durian dan rumah kemas PT Silvia Amerta Jaya, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025. Pendampingan bertujuan untuk: 1) pemenuhan keamanan pangan produksi durian; dan 2) penanganan durian segar pada rumah kemas PT Silvia Amerta Jaya dalam pelaksanaan audit GACC untuk membuka peluang ekspor durian asal Indonesia ke China/Tiongkok;

PT Silvia Amerta Jaya memiliki ruang lingkup usaha penanganan durian beku yang diekspor ke Thailand dan akan mengembangkan penanganan durian segar dengan tujuan diekspor ke China/Tiongkok. Bahan baku durian yang memasok ke PT Silvia Amerta Jaya merupakan durian jenis Moutong yang berasal dari kebun yang telah memiliki registrasi kebun (GAP) dari beberapa kabupaten wilayah Sulawesi Tengah.

C. QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Pengawasan Dan Pengendalian Produk (QIA) atas Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Rutin pada Bulan Ramadhan dan Menjelang HBKN

Kegiatan pengawasan dilaksanakan di Lotte Grosir Pasar Rebo, Istana Kurma, Karam Grosir oleh tim Direktorat PPSKMP pada tanggal 5 Maret 2025. Kegiatan pengawasan mencakup sampling kurma sejumlah 5 (lima) nama dagang dari masing-masing lokasi, pengawasan label PSAT, dan pengujian kurma ke laboratorium terakreditasi untuk parameter Salmonella dan kapang khamir. Penanganan kurma sudah baik tetapi belum memiliki Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT). Sampel kurma yang diambil dari masing-masing lokasi dari 5 (lima) jenis nama dagang yang berbeda dan/atau dari importir yang berbeda.

Beberapa temuan ketidaksesuaian hasil pengawasan label kurma, diantaranya terdapat beberapa jenis kurma yang belum mendaftarkan izin edar PSAT sehingga belum terdapat label dan kemasan sesuai Perbadan 1/2023. Selain itu terdapat kurma yang masih memilikis izin edar BPOM.

Atas hasil pengawasan tersebut, tim telah mensosialisasikan dan mendorong manajemen ritel modern (Lotte Grosir Pasar Rebo) untuk mendaftarkan SPPB-PSAT ke OKKPD Provinsi, serta menetapkan kebijakan terkait kewajiban produk PSAT yang diterima telah memiliki nomor izin edar.

2. Laporan Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan pada Bulan Ramadhan dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025

Kegiatan pengawasan dilaksanakan di Farmers Market Bintaro, Hero Emerald Tangerang Selatan; Toko Oleh Oleh Shafa Marwah,Kota Bogor; Toko Gudang Kurma, Depok oleh tim Direktorat PPSKMP pada tanggal 11 Maret 2025. Kegiatan pengawasan mencakup sampling kurma sejumlah 5 (lima) nama dagang dari masing-masing lokasi, pengawasan label PSAT, dan pengujian kurma ke laboratorium terakreditasi untuk parameter Salmonella dan kapang khamir.

Secara umum, kondisi sanitasi higiene di ritel modern sudah baik dan telah menerapkan pemisahan produk sesuai karakteristiknya, tetapi belum memiliki Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT). Sampel kurma yang diambil dari masing-masing lokasi dari 5 (lima) jenis nama dagang yang berbeda dan/atau dari importir yang berbeda. Atas hasil pengawasan tersebut, tim telah mensosialisasikan dan mendorong manajemen ritel modern untuk mendaftarkan SPPB- PSAT ke OKKPD Provinsi, serta menetapkan kebijakan terkait kewajiban produk PSAT yang diterima telah memiliki nomor izin edar.

3. Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Program Makan Bergizi Gratis

Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MGB) telah dilaksanakan SPPG Yayasan Tahfidz Al Quran Baitul Mukmin Bekasi dan SPPG Kebanyunan Tapos 1-5 Depok pada 12 Maret 2025.

Badan Pangan Nasional selanjutnya mendapatkan masukan dari pelaksana program MBG sebagai bahan untuk memperkaya Pedoman Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk Mendorong Program MBG yang sedang disusun oleh Badan Pangan Nasional. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah:

- Kunjungan ke SPPG khusus, yaitu SPPG yang baru dibangun Ketika ada program MBG. Sosialisasi dan promosi kepada siswa, guru, orang dan tua terkait dengan konsumsi makan B2SA dan pengurangan food waste.
- Selanjutnya perlu dilakukan pengambilan sampling terhadap bahan baku pangan segar yang digunakan di program MBG, selanjutnya diuji keamanan pangan dengan Rapid test kit guna menjamin keamanan pangan bahan baku.

4. Pendampingan Auditor GACC di Laboratorium PT. SIG

Pelaksanaan kunjungan di Laboratorium PT. SIG ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapan Indonesia terkait fasilitas pengujian atau laboratorium dalam memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah Tiongkok. Dengan memperhatikan kasus penolakan produk durian dari Thailand dan Vietnam akibat cemaran bahan kimia, menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi perhatian pemerintah Tiongkok.

Dengan demikian, dukungan penjaminan keamanan dan mutu pangan melalui tersedianya laboratorium uji kompeten yang didukung dengan fasilitas dan sumber

daya yang memadai sangat penting untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan dapat diandalkan. Laboratorium PT SIG merupakan laboratorium milik swasta yang telah terakreditasi secara nasional (ISO/EIC 17025:2017) maupun internasional (GMP+ FSA International) dan telah banyak bekerja sama dengan lembaga pemerintah, industri besar maupun kecil.

GACC menyampaikan Badan Pangan Nasional selaku lembaga yg menjamin keamanan pangan komoditas ekspor, sebaiknya mempunyai laboratorium yg kompeten khususnya pada lokasi sentra produksi pangan prioritas diekspor sehingga dapat menperkuat jaminan keamanan pangan.

5. Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Konsultasi Izin Edar Pangan Segar dalam Kegiatan Pembukaan Balkot Ramadhan Fest 2025

Balkot Ramadhan Fest 2025 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mengendalikan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Acara ini mencakup gelar pangan murah dan pameran UMKM, yang bertujuan untuk memberikan akses pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Dalam sambutan Badan Pangan Nasional yang diwakili oleh Direktur 3.3 disampaikan kondisi ketersediaan dan harga pangan secara umum dan pentingnya keamanan pangan untuk kesehatan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan ini, Badan Pangan Nasional turut berkontribusi melalui kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar melalui pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan. Sampel yang diambil meliputi PSAT berupa cabai merah, cabai rawit, tomat, wortel, sawi, kentang, dan bawang merah.

Sampel yang telah diambil kemudian diuji menggunakan metode rapid test kit untuk mendeteksi cemaran residu pestisida. Dari hasil uji cepat yang dilakukan, seluruh sampel menunjukkan hasil negatif residu pestisida, yang mengindikasikan bahwa PSAT aman untuk dikonsumsi.

Selain melakukan pengawasan pangan segar, Badan Pangan Nasional berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan membuka booth konsultasi perizinan pangan segar, yang dikelola oleh Sekretariat OKKP Pusat. Booth ini disediakan sebagai wadah bagi pelaku usaha pangan segar, untuk mendapatkan informasi terkait prosedur perizinan edar pangan segar.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada periode bulan Maret Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan DIPA awal Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Rp. 40.284.839.000.- dimana terdapat blokir sehingga anggaran menjadi Rp28.391.400.000,-.
2. Realisasi keuangan pada bulan Maret 2025 adalah sebesar Rp. 460.628.454, 3,73% atau 1,14% dari pagu anggaran pada DIPA Awal 2025. Dengan kata lain, realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret tahun 2025 sebesar Rp. 669.560.032 atau sebesar 5,43% dari Pagu DIPA setelah dikurang blokir.

IV.2 Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Namun demikian dengan ditetapkannya efisiensi anggaran, cukup mempengaruhi pelaksanaan kegiatan karena perencanaan yang sudah dirumuskan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

IV.3 Rekomendasi

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan ke depan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 205 Revisi ke-4 Tanggal 25 Maret 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4464-4007-5900-3533

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**690590**	**BADAN PANGAN NASIONAL**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.561.544	7.338.840	11.609.347	46.516.069	14.351.499	16.149.598	16.055.587	16.328.261	19.526.848	18.648.656	16.769.690	124.387.856	310.243.795
		BELANJA PEGAWAI	1.604.118	3.740.735	6.112.715	3.112.715	4.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.106.008	62.254.305
		BELANJA BARANG	955.077	3.563.778	5.437.061	43.265.743	9.035.115	9.367.710	9.612.855	9.887.032	10.345.745	10.632.284	10.353.904	111.087.882	233.544.186
		BELANJA MODAL	2.348	34.327	59.571	137.611	1.090.954	556.458	217.301	215.798	2.955.672	1.790.941	190.355	7.193.967	14.445.304
	125.01.HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	307.757	952.292	968.515	37.900.184	2.270.925	2.234.702	2.691.558	2.868.935	2.675.619	2.755.200	2.693.509	42.898.932	101.218.129
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	307.757	947.052	958.808	37.872.505	2.230.399	2.191.988	2.634.171	2.809.957	2.618.828	2.696.341	2.638.663	42.439.660	100.346.129
		53 BELANJA MODAL	0	5.240	9.707	27.679	40.526	42.713	57.387	58.979	56.791	58.859	54.847	459.272	872.000
	125.01.HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0	0	928.579	1.128.579	1.330.466	1.480.466	1.394.239	1.390.466	4.568.231	1.702.532	1.938.491	37.714.952	53.577.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	923.369	1.125.512	1.324.794	1.474.794	1.345.473	1.341.700	1.787.069	1.649.018	1.912.656	34.024.215	46.908.600
		53 BELANJA MODAL	0	0	5.210	3.067	5.672	5.672	48.766	48.766	2.781.162	53.514	25.835	3.690.737	6.668.400
	125.01.HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	176.118	274.486	1.001.193	1.186.076	1.151.986	1.357.898	1.406.338	1.368.540	1.439.978	3.272.723	1.225.266	26.424.237	40.284.839
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	176.118	274.209	995.241	1.137.309	1.101.805	1.307.717	1.358.874	1.318.359	1.392.514	1.660.117	1.176.220	24.576.755	36.475.239
		53 BELANJA MODAL	0	277	5.952	48.767	50.181	50.181	47.464	50.181	47.464	1.612.606	49.046	1.847.482	3.809.600
	125.01.WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.077.669	6.112.062	8.711.061	6.301.230	9.598.122	11.076.532	10.563.452	10.700.320	10.843.020	10.918.200	10.912.422	17.349.735	115.163.827
		51 BELANJA PEGAWAI	1.604.118	3.740.735	6.112.715	3.112.715	4.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.106.008	62.254.305
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	471.203	2.342.517	2.559.643	3.130.417	4.378.116	4.393.209	4.274.337	4.417.016	4.547.334	4.626.807	4.626.365	10.047.252	49.814.218

BADAN PANGAN NASIONAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4464-4007-5900-3533

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		53 BELANJA MODAL	2.348	28.810	38.702	58.098	994.575	457.892	63.685	57.873	70.256	65.962	60.627	1.196.476	3.095.304

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pangan Nasional

ttd.
Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c)
NIP. 197411272022211004

Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Maret Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Program, Kegiatan, KRO, RO				Jumlah Pagu		REALISASI s.d Maret 2025			Sisa Anggaran
				DIPA 02	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
HA.6877				**40.284.839.000**	**12.333.462.000**	**669.560.032**	**1,66%**	**5,43%**	**11.663.901.968**
ABR		**Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan**		**1.243.760.000**	**679.000.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**679.000.000**
	ABR.002		Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	0	0,00%	0,00%	679.000.000
AEA		**Koordinasi**		**17.349.130.000**	**3.290.452.000**	295.796.254	**1,70%**	**8,99%**	**2.994.655.746**
	AEA.001		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	88.774.207	1.635.382.000	88.774.207	1,13%	5,43%	1.546.607.793
	AEA.002		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	123.034.605	2,66%	9,73%	1.141.025.395
	AEA.003		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	83.987.442	1,73%	21,48%	307.022.558
AFA		**Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**		**1.900.000.000**	**534.775.000**	**46.619.345**	**2,45%**	**8,72%**	**488.155.655**
	AFA.001		NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	46.619.345	7,77%	99,56%	205.655
	AFA.002		NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	0	0,00%	0,00%	276.550.000
	AFA.003		NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	0	0,00%	0,00%	211.400.000
BDG		**Fasilitasi dan Pembinaan UMKM**		**2.000.000.000**	**1.176.595.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**1.176.595.000**

Program, Kegiatan, KRO, RO		Jumlah Pagu		REALISASI s.d Maret 2025			Sisa Anggaran
		DIPA 02	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2.000.000.000	1.176.595.000	**0**	**0,00%**	**0,00%**	1.176.595.000
PCA	**Perizinan Produk**	**2.500.000.000**	**722.860.000**	**37.634.443**	**1,51%**	**5,21%**	**685.225.557**
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	37.634.443	1,51%	5,21%	685.225.557
PEH	**Promosi**	**3.500.000.000**	**1.075.400.000**	100.295.505	**2,87%**	**9,33%**	**975.104.495**
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	100.295.505	2,87%	9,33%	975.104.495
QDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**2.404.489.000**	**767.490.000**	**46.316.616**	**1,93%**	**6,03%**	**721.173.384**
QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	12.490.106	1,38%	20,78%	47.609.894
QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	707.390.000	33.826.510	2,26%	4,78%	673.563.490
QDD	**Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**	**684.460.000**	**116.250.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**116.250.000**
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000	116.250.000	0	0,00%	0,00%	116.250.000
QIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**	**2.998.000.000**	**1.389.630.000**	**142.897.869**	**4,77%**	**10,28%**	**1.246.732.131**
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	142.897.869	4,77%	10,28%	1.246.732.131
QMA	**Data dan Informasi Publik**	**1.500.000.000**	**356.010.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**356.010.000**
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	356.010.000	0	0,00%	0,00%	356.010.000

Program, Kegiatan, KRO, RO				Jumlah Pagu		REALISASI s.d Maret 2025			Sisa Anggaran
				DIPA 02	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
RAG			**Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**4.205.000.000**	**2.225.000.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**2.225.000.000**
	RAG.001		Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0,00%	0,00%	2.225.000.000